

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor industri merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. dikarenakan sektor industri manufaktur mampu berkontribusi menyumbang output nasional, menyerap tenaga kerja dan sektor industri memiliki komoditas manufaktur yang dapat diandalkan untuk ekspor barang dan jasa. Begitu pentingnya sektor industri sehingga memiliki peranan sebagai sektor pemimpin (*leading sector*). Hal ini dikarenakan pembangunan sektor industri akan dikaitkan dengan keberhasilan sebuah pembangunan. Dengan industrialisasi akan meningkatkan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan daya beli (permintaan) masyarakat. Adanya peningkatan pendapatan dan daya beli (permintaan) tersebut menunjukkan bahwa perekonomian itu tumbuh dan sehat.

Sayangnya sektor industri manufaktur di Indonesia tidak terlepas dari beberapa masalah. Menurut data yang dilansir dari katadata.co.id kinerja industri manufaktur di indonesia cenderung menurun. Pada tahun 2000 sektor industri manufaktur menyumbang 56% total ekspor tapi pada tahun 2013 hanya sebesar 37%. Aswicahyono (peneliti *centre of strategic and international studies*) masalah-masalah lainnya selain ekspor yang menurun adalah upah buruh yang meningkat tapi tidak disertai dengan kenaikan produktifitas, tertinggalnya jaringan produksi global

terutama produk garmen dan elektronik, iklim investasi yang buruk, minimnya iklim infrastruktur, tingginya tingkat korupsi dan sumber daya manusia yang lemah¹.

Pertumbuhan sektor industri manufaktur masih tergolong rendah. Menurut data yang dilansir dari katadata.co.id saat ini pertumbuhan sektor industri manufaktur di Indonesia lebih rendah daripada Vietnam yakni hanya sebesar 4,6%. Ada dua subsektor yang mengalami perlambatan yang cukup parah yakni industri farmasi dan industri barang kimia. Selain itu impor barang modal juga menurun, pada periode januari-april 2016 impor barang modal sebesar 11.88% sementara pada periode januari-mei impor barang modal sebesar 9.31%. makin rendahnya impor barang modal dapat mengindikasikan bahwa industri manufaktur belum mampu mengolah modal fisik secara optimal sehingga yang terjadi adalah penurunan kebutuhan barang modal fisik untuk menghasilkan output industri manufaktur. Apabila modal fisik yang dibutuhkan turun. Maka output yang dihasilkan otomatis akan mengalami penurunan dan masalah ini kelak bisa berpotensi menurunkan penyerapan tenaga kerja.

Tenaga kerja merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melakukan produksi barang maupun jasa. Dengan sejumlah tenaga kerja, bahan mentah dan modal akan diolah menjadi produk yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan kata lain tenaga kerja merupakan input faktor produksi yang sangatlah vital bagi pertumbuhan output. Apabila produsen tidak memiliki jumlah

¹Fuad Fahmi, *Industri Manufaktur Hadapi Masalah*, <http://katadata.co.id/berita/2014/10/14/industri-manufaktur-hadapi-masalah> (diakses tanggal 18 mei 2016)

tenaga kerja yang cukup untuk melakukan kegiatan produksi, maka akan timbul masalah yakni output yang dihasilkan tidak mencapai kondisi optimal dan produsen tidak mampu mencapai laba maksimal.

Tabel I.1
Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Dan Pendidikan Tertinggi di Indonesia (Dalam Jiwa)

Sektor	2015 Agustus								
	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan								
	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak/belum tamat SD	SD	SLTP	SLTA Umum/SMU	SLTA Kejuruan/SMK	Akademi/Diploma	Universitas	Total
Pertanian	3.171.945	8.472.874	15.032.024	6.288.606	3.369.969	1.030.715	127.729	254.366	37.748.228
Pertambangan dan Penggalian	29.502	173.657	397.409	219.534	265.277	128.908	31.808	74.371	1.320.466
Industri Manufaktur	301.747	1.389.221	3.454.174	3.384.005	3.194.675	2.615.044	287.986	628.247	15.255.099
Listrik, Gas, dan Air Minum	481	1.977	23.591	39.978	79.812	93.161	12.700	36.997	288.697
Konstruksi	88.314	945.152	2.957.162	2.068.996	1.082.211	704.186	75.932	286.133	8.208.086
Perdagangan, Rumah Makan	555.564	2.581.859	6.175.981	5.264.922	6.070.383	3.233.333	646.072	1.158.228	25.686.342
Transportasi, Pergudangan	41.815	461.651	1.192.970	1.133.210	1.179.205	636.871	162.671	298.424	5.106.817
Keuangan, Real Estate	11.962	65.429	191.099	265.795	871.354	508.739	284.740	1.067.420	3.266.538
Jasa Kemasyarakatan, sosial, perorangan	186.574	859.292	2.063.168	2.033.598	3.700.487	1.886.292	1.456.806	5.752.709	17.938.926
Total	4.387.904	14.951.112	31.487.578	20.698.644	19.813.373	10.837.249	3.086.444	9.556.895	114.819.199

Sumber :Badan Pusat Statistik

Kontribusi sektor industri manufaktur sangat besar dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah penduduk yang bekerja. Sektor industri manufaktur mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 15.255.099 pada periode Agustus 2015. Hal ini berarti kontribusi jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan dibandingkan dengan total jumlah penduduk yang bekerja di seluruh sektor adalah 13,28%. Kontribusi ini merupakan tertinggi ke empat setelah sektor pertanian yang mampu menyerap 37.748.228 jiwa (32,87%); perdagangan, rumah makan dan akomodasi 25.686.342 jiwa (22,37%); jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan 17.938.926 jiwa (15,62%).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pendidikan jumlah tenaga kerja industri manufaktur di Indonesia masih rendah. Hal ini dikarenakan dominasi jumlah

penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan adalah dari lulusan SD (22,64%), kemudian disusul oleh lulusan SMP (22,18%) dan SMA (20,94%), kontribusi lulusan perguruan tinggi sangatlah minim hanya 4,11%. Dominasi lulusan berpendidikan rendah pada sektor ini mampu mengakibatkan rendahnya produktifitas dikarenakan kurangnya riset dan penelitian yang mampu mengembangkan industri pengolahan. Kurangnya tenaga kerja yang terdidik dan terampil akan mengganggu produktifitas produksi. Sehingga kelak dikhawatirkan sektor industri hanya akan memberikan sumbangsih nilai Ekspor dan PDB yang semakin rendah dari tahun ke tahun serta akan menurunkan penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut.

Permasalahan penurunan jumlah tenaga kerja terjadi di Pulau Sumatera. Jika dibandingkan pulau-pulau lainnya di kawasan Indonesia bagian barat. Pulau Sumatera merupakan kawasan Indonesia Barat yang memiliki berbagai sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam tersebut seharusnya mampu dijadikan bahan baku proses produksi untuk kegiatan industri manufaktur, sehingga kelak mampu menghasilkan nilai output yang besar. Namun kenyataannya, jumlah penduduk yang bekerja di Pulau Sumatera masih lebih rendah daripada jumlah penduduk yang bekerja pada sektor industri manufaktur di Pulau Jawa. Menurut data yang dilansir dari BPS pada tahun 2013 pulau Sumatera hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 1583.452 jiwa dan pada periode yang sama pulau Jawa mampu menyerap tenaga kerja sebesar 11.927.181 jiwa. Pada tahun 2014 pulau Sumatera hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 1160.968 jiwa dan pada periode yang sama pulau Jawa mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 12.067.996. kemudian pada tahun

2015 pulau sumatera hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 1687.938 jiwa dan pada periode yang sama pulau Jawa mampu menyerap tenaga kerja sebesar 12.048.908 jiwa.

TABEL I.2
Jumlah Penduduk Yang Bekerja Di Sektor Industri Manufaktur Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2013-2015 (Dalam Jiwa)

Provinsi	2013		2014		2015	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Aceh	81.710	74.656	117.161	91.132	137.154	93.698
Sumatera Utara	414.322	428.182	399.691	461.372	527.943	450.445
Sumatera Barat	186.029	132.286	157.035	149.483	177.171	146.076
Riau	129.385	159.070	146.622	163.941	136.067	152.471
Jambi	52.323	52.543	43.971	52.473	90.073	61.998
Sumatera Selatan	191.939	171.486	179.676	186.597	257.365	173.890
Bengkulu	37.197	25.570	35.886	26.992	51.757	35.461
Lampung	277.601	289.173	313.816	292.237	372.551	331.444
Bangka-Belitung	33.552	36.525	35.151	35.500	47.376	35.225
Kepulauan Riau	127.528	213.961	126.575	201.241	191.307	207.230

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data yang peneliti akses dari Badan Pusat Statistik (BPS), peneliti menemukan penurunan jumlah penduduk yang bekerja pada sektor industri manufaktur di Pulau Sumatera dari suatu periode jika dibandingkan periode tahun sebelumnya (*Year on Year*). di Bulan Februari tahun 2014 provinsi yang mengalami penurunan jumlah penduduk yang bekerja sektor industri manufaktur dibandingkan

Bulan Februari 2013 adalah Provinsi Sumatera Utara yakni turun dari 414.322 orang menjadi 399.619 orang (turun sebesar 3,53%), Provinsi Sumatera Barat juga terjadi penurunan dari 186.029 menjadi 157.035 (turun sebesar 15,59%), Provinsi Jambi juga terjadi penurunan dari 52.323 menjadi 43.971 (turun sebesar 15,96%), Provinsi Sumatera selatan juga terjadi penurunan dari 191.939 menjadi 179.676 (turun sebesar 6,39%), Provinsi Bengkulu juga terjadi penurunan dari 37.197 menjadi 35.886 (turun sebesar 3,52%), Provinsi Kepulauan Riau juga terjadi penurunan dari 127.528 menjadi 126.575 (turun sebesar 0,75%). pada periode Agustus 2014 provinsi yang mengalami penurunan jumlah penduduk yang bekerja sektor industri manufaktur adalah Provinsi Bangka belitung yakni dari 36.525 menjadi 35.500 (turun sebesar 2,81%), Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami penurunan dari 213.916 menjadi 201.241 (turun sebesar 5,95%). Pada periode Februari 2015 provinsi yang mengalami penurunan jumlah penduduk yang bekerja sektor industri manufaktur adalah Provinsi Riau yakni dari 146.622 menjadi 136.067 (turun sebesar 7,20%). Pada periode Agustus 2015 provinsi yang mengalami penurunan jumlah penduduk yang bekerja sektor industri manufaktur adalah provinsi Sumatera utara yakni turun dari 461.372 menjadi 450.455 (turun sebesar 2,37%), Provinsi Sumatera barat turun dari 149.483 menjadi 146.076 (turun sebesar 2,28%), Provinsi Riau turun dari 163.941 menjadi 152.471 (turun sebesar 7%), Provinsi Sumatera Selatan turun dari 186.597 menjadi 173.890 (turun sebesar 6.81%), Provinsi Bangka Belitung turun dari 35.500 menjadi 35.225 (turun sebesar 0,77%).

Banyak faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di sektor industri diantaranya adalah tingkat upah, tingkat pendidikan. Selain kedua faktor tersebut, penyerapan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh faktor investasi, jumlah penduduk dan kemajuan teknologi.

Faktor pertama adalah tingkat upah yang berlaku. Dalam memproduksi output barang dan jasa yang diperlukan, perusahaan akan membutuhkan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja. Sedangkan upah merupakan salah satu biaya produksi yang harus dikeluarkan produsen sebagai balas jasa atas kegiatan produksi yang dilakukan tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat upah yang berlaku maka tenaga kerja yang digunakan oleh produsen akan semakin sedikit. Hal tersebut bisa menjadi lebih parah apabila kenaikan tingkat upah minimum justru tidak meningkatkan produktifitas tenaga kerja dalam menghasilkan output. Ini dapat menjadi beban bagi perusahaan.

Tingginya upah minimum provinsi tentunya merupakan salah satu faktor potensial yang dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera. Menurut data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik tahun 2014 upah minimum provinsi terendah di Pulau Sumatera adalah provinsi Bengkulu dengan nilai sebesar 1350.000 rupiah sedangkan 9 provinsi sisanya memiliki tingkat upah yang lebih tinggi. Sedangkan jika dibandingkan dengan Pulau Jawa, hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa memiliki nilai yang kecil yakni provinsi Banten hanya 1325.000 rupiah, Jawa Timur sebesar 1000.000 rupiah, DI Yogyakarta sebesar 988.500 rupiah, Jawa Tengah sebesar 910.000 Rupiah dan Jawa Barat sebesar 1000.000 rupiah.

kecenderungan penurunan penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera dikarenakan dengan meningkatnya upah minimum maka produsen akan berusaha melakukan efisiensi untuk menutupi pembengkakan biaya produksi. Terlebih lagi apabila peningkatan upah minimum tidak disertai dengan peningkatan produktifitas.

TABEL 1.3
Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2012-2014 (Dalam Rupiah)

Provinsi	Upah minimum provinsi			
	2012	2013	2014	2015
Aceh	1400000	1550000	1750000	1900000
Sumatera Utara	1200000	1375000	1505850	1625000
Sumatera Barat	1150000	1350000	1490000	1615000
Riau	1238000	1400000	1700000	1878000
Jambi	1142500	1300000	1502300	1710000
Sumatera Selatan	1195220	1630000	1825000	1974346
Bengkulu	930000	1200000	1350000	1500000
Lampung	975000	1150000	1399037	1581000
Kep Bangka Belitung	1110000	1265000	1640000	2100000
Kep Riau	1015000	1365087	1665000	1954000

Sumber : Badan Pusat Statistik

Data statistik diatas, terlihat bahwa seluruh provinsi di Pulau Sumatera memiliki upah minimum yang lebih besar daripada beberapa provinsi di Pulau Jawa seperti Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta. Dengan tingkat upah yang lebih besar di Pulau Sumatera daripada Pulau Jawa. Maka peneliti menduga hal ini akan menyebabkan kecenderungan penurunan penyerapan tenaga kerja industri manufaktur di Pulau Sumatera. Terutama provinsi-provinsi yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja dan memiliki upah minimum cukup besar pada periode pertengahan (Bulan Agustus) tahun 2014 yakni Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Bangka Belitung yakni dari 36.525 menjadi 35.500 (turun sebesar 2,81%), Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan dari 213.916 menjadi 201.241 (turun sebesar 5,95 %). Pada periode yang sama laju pertumbuhan upah minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan yang tertinggi pertama (Yakni 33%) dan Provinsi Kepulauan Riau memiliki laju pertumbuhan upah minimum tertinggi kedua (yakni 22%) di Pulau Sumatera.

Faktor Kedua yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah tingkat pendidikan. Masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang bekerja di sektor industri manufaktur akan menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas output yang diproduksi oleh produsen dan secara langsung akan berdampak pada rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur.

Tabel I.4
Jumlah Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Diploma Dan perguruan Tinggi

Provinsi	Diploma dan perguruan tinggi			
	2012	2013	2014	2015
Aceh	1.933	4.214	3.378	5.960
Sumatera Utara	25.458	22.009	25.497	25.048
Sumatera Barat	5.559	6.722	9.042	5.413
Riau	7.432	10.805	6.456	9.185
Jambi	1.920	3.682	3.659	4.476
Sumatera Selatan	8.582	5.746	9.283	7.316
Bengkulu	627	715	434	2.428
Lampung	7.061	10.799	8.863	9.250
Bangka-Belitung	846	730	1.321	1.322
Kepulauan Riau	19.396	20.565	14.798	17.373

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Badan Pusat Statistik tahun 2014, Provinsi Aceh dari 91.132 jiwa penduduk yang bekerja sektor industri hanya 1.755 jiwa yang mencapai pendidikan diploma (1,92%) dan hanya 1.623 jiwa (1,78%) yang mencapai pendidikan DIV/Universitas. Di Provinsi Sumatera Utara dari 461.372 jiwa penduduk yang bekerja di sektor industri manufaktur, hanya 5987 jiwa (1,29%) yang mencapai pendidikan hingga tingkat diploma dan hanya 19.510 jiwa (4,22%) jiwa penduduk yang mencapai pendidikan hingga tingkat universitas. Di Provinsi Sumatera Barat dari 149.483 jiwa yang bekerja di sektor industri manufaktur, hanya 4954 (0,88%) orang yang memiliki pendidikan diploma dan 4088 jiwa (3,05%) yang memiliki pendidikan hingga jenjang universitas. Di provinsi Sumatera Selatan dari 186.597 jiwa yang bekerja di Sektor industri manufaktur hanya 9283 jiwa (4,97%) yang memiliki pendidikan hingga jenjang diploma dan universitas. Kemudian di provinsi Bengkulu dari 26.922 jiwa penduduk yang bekerja di sektor industri manufaktur hanya 434 jiwa (1,06%) yang memiliki pendidikan diploma/perguruan tinggi. Di Provinsi Lampung dari 292.237 jiwa penduduk yang bekerja di industri manufaktur hanya 8863 jiwa (3,03%) yang memiliki pendidikan diploma/perguruan tinggi. Di Provinsi Bangka Belitung dari 35.500 jiwa yang bekerja di industri manufaktur hanya 1321 (3,72 %) yang memiliki pendidikan diploma/universitas. Di Provinsi Kepulauan Riau dari 201.241 jiwa penduduk yang bekerja di indutri manufaktur hanya 3309 jiwa (1,64%) yang memiliki pendidikan Diploma dan 11489 jiwa (5,7 %) yang memiiki pendidikan universitas.

Menurut menteri perindustrian Saleh Husin menuturkan bahwa pertumbuhan industri manufaktur sangat dipengaruhi nilai investasi yang masuk. Beberapa investor fokus pada kompetensi pekerja sehingga investor lebih tertarik berinvestasi di tempat yang memiliki kualitas SDM yang mumpuni². Jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang terdapat di pulau sumatera, hal ini menjadi masalah yang krusial karena tingkat pendidikan tinggi yang masih jauh dari mencukupi untuk mengoptimalkan kapasitas produksi dan mampu menyerap tenaga kerja. tingkat pendidikan tinggi hanya berada di bawah 5% di setiap provinsi. Tentunya dengan tingkat pendidikan yang rendah mencerminkan kualitas *human capital* yang belum memiliki kapabilitas maksimal..

Faktor ketiga yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah investasi. Investasi ini kelak akan diubah menjadi modal. Modal tersebut akan dipergunakan untuk membeli berbagai barang modal dan perlengkapan berproduksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Menurut data yang peneliti akses dari presidenri.go.id nilai investasi di Pulau Sumatera mencapai 84 triliun rupiah. nilai investasi tersebut tertinggi kedua di luar Pulau Jawa³. Namun laju pertumbuhan investasi di Pulau Sumatera hanya sebesar

² Aris Ginarjar, *Rendahnya kualitas SDM Pengaruhi Pertumbuhan Industri Nasional*, <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2016/05/12/527297/rendahnya-kualitas-sdm-pengaruhi-pertumbuhan-industri-n> (diakses tanggal 27 juli 2016)

³Ahmad Januardi, *Realisasi investasi 2015 mendukung produktifitas daya saing*, presidenri.go.id/ulasan/perekonomian/realisasi-investasi-2015-mendukung-produktivitas-dan-daya-saing.html (diakses 20 mei 2016)

19%. Nilai tersebut merupakan yang paling kecil jika dibandingkan pulau-pulau lainnya diluar pulau Jawa yakni pulau Sulawesi (236%), Papua dan Maluku (136%), dan Kalimantan (30%). Hal ini dikarenakan pemerintah lebih berfokus pada pembangunan provinsi-provinsi di wilayah Indonesia bagian timur.

Faktor keempat adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), menurut Badan Pusat Statistik TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Hal ini tentunya akan berkaitan secara langsung dengan penyediaan faktor produksi tenaga kerja yang tersedia. Dengan semakin tingginya TPAK maka output yang dihasilkan akan meningkat dan dikarenakan tujuan produsen adalah mencapai laba maksimal, produsen akan menambah faktor produksi tenaga kerja.

Menurut data yang peneliti himpun dari Badan Pusat Statistik, tingkat partisipasi rata-rata di Indonesia pada periode Agustus 2015 adalah 65,76%. Beberapa provinsi di Pulau Sumatera masih memiliki Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dibawah rata-rata nasional seperti Provinsi Aceh (63,44%), Sumatera Barat (64,56%) dan Provinsi Riau (63,22%).

Mengingat kontribusi sektor Industri manufaktur sangat besar dalam menyerap tenaga kerja, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang masalah penyerapan tenaga kerja di pulau Sumatera tahun 2012 hingga 2015

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penyerapan tenaga kerja sektor Industri manufaktur pada Pulau Sumatera dipengaruhi hal-hal berikut:

1. Tingginya upah minimum provinsi di pulau sumatera
2. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang bekerja sektor industri manufaktur di pulau sumatera
3. Rendahnya pertumbuhan investasi di Pulau sumatera
4. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja di pulau sumatera

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, pada kenyataannya masalah penyerapan tenaga kerja memiliki aspek, dimensi dan faktor-faktor yang luas dan kompleks. Oleh karena itu peneliti membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada “Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja industri manufaktur di pulau sumatera tahun 2012-2015”

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dibuat maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Pulau Sumatera?

2. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Pulau Sumatera?
3. Apakah terdapat pengaruh upah minimum provinsi dan tingkat pendidikan secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Pulau Sumatera?

E. Kegunaan penelitian

Adapun beberapa kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan menambah referensi informasi serta khasanah ilmu tentang upah minimum provinsi, tingkat pendidikan, penyerapan tenaga kerja.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya jika akan melakukan penelitian yang terkait dengan upah minimum provinsi, tingkat pendidikan, dan penyerapan Tenaga kerja.